

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menurut UU Perbankan Nomer 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan (Levine dalam Widjojo, 2010:42). Oleh karena itu, keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien, dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan BPD mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010). Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga

mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. Maka dengan demikian BPD juga memberikan jasa kredit kepada masyarakat.

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional yang memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

Setelah Bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut diputar atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah *lending* (kredit). Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan *funding* (menghimpun dana) dan *lending* (menyalurkan dana dalam bentuk kredit), merupakan kegiatan utama perbankan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet (Kasmir, 2002:71-72 ).

Dalam pemberian kredit, bank harus yakin akan kemampuan dan kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga tepat pada waktu yang telah

di tentukan oleh bank. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan kinerja keuangan calon debitur sebagai bahan perhitungan.

Salah satu persetujuan kredit yang diberikan oleh bank yaitu kredit berdasarkan sektor ekonomi dan non sektor ekonomi. Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha dan lain-lain. Sedangkan pemberian kredit pada non sektor ekonomi yang dimaksud adalah pemberian kredit berdasarkan tujuan penggunaannya seperti Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. Dan Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

Mengingat risiko yang dihadapi oleh Bank cukup besar dalam pemberian kredit pada berbagai sektor ekonomi yang ada, makasangat diharapkan pemberian masing-masing sektor ekonomi dapat optimal, dan padaakhirnya diharapkan memiliki risiko paling minimal. Bank dalam memberikankreditnya terbagi dalam beberapa

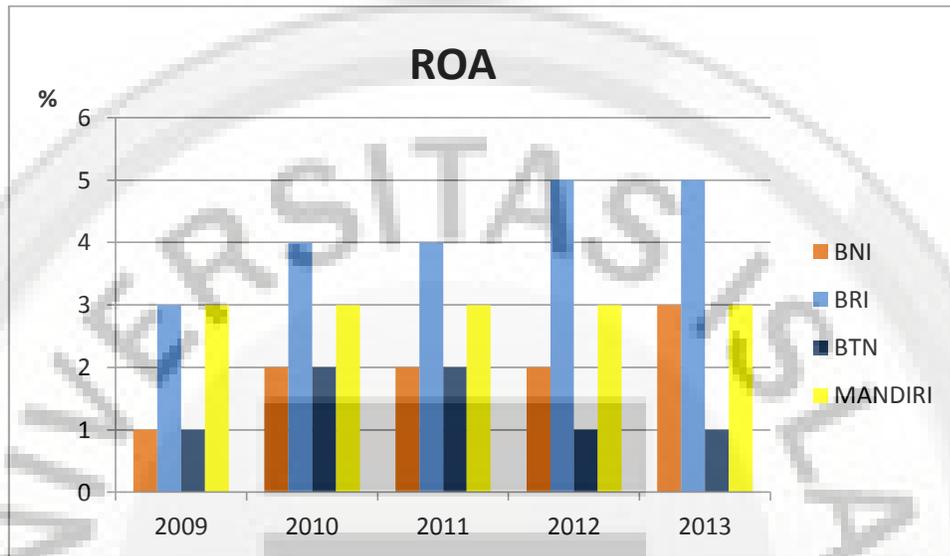
sektor ekonomi dan besarnya porsi pemberian kredit dapat terlihat dari posisi kredit masing-masing sektor ekonomi.

Pemberian kredit terhadap sektor ekonomi dan non sektor ekonomi pada perbankan melakukan pembagian sektor industri dalam memberikan kreditnya, hal ini lebih dikenal sebagai portofolio kredit perbankan. Setiap bank berhak menentukan pemberian kredit yang akan diberikan pada sektor ekonomi dan non sektor ekonomi tertentu sesuai dengan risiko yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing manajemen perbankan itu sendiri, tentu tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral, Bank Indonesia. Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi, meskipun masing-masing perbankan telah memilih sektor ekonomi apa yang akan diberikan kredit dan kemungkinan memiliki risiko default paling kecil, namun tetap saja hal itu belum dapat diminimalisasi, dan masih menjadi tantangan untuk dapat meminimalisasi risiko dan mengelola risiko dengan baik.

Berikut ini adalah fenomena ROA dan NPL yang terjadi dalam perbankan konvensional pada tahun 2009-2013:

**Gambar 1.1**

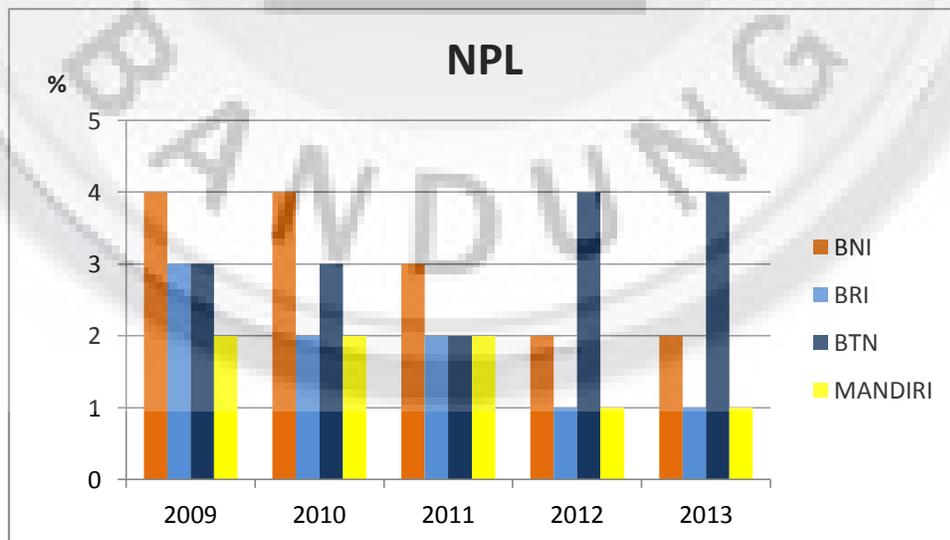
**Grafik Perkembangan ROA pada Bank Konvensional tahun 2009-2013**



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

**Gambar 1.2**

**Grafik Perkembangan NPL pada Bank Konvensional tahun 2009-2013**



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dalam grafik di atas dapat disimpulkan bahwa bank BNI, BRI, dan MANDIRI mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2013 ketiga bank tersebut jumlah ROA  $> 2\%$  dan jumlah NPL  $< 5\%$ . Sedangkan bank BTN mengalami perkembangan yang tidak baik setiap tahunnya karena pada tahun 2012 dan 2013 jumlah ROA menurun menjadi  $1\%$  dan jumlah NPL meningkat menjadi  $4\%$ .

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila  $> 2\%$ .

Sedangkan resiko yang terdapat dalam pemberian kredit dapat dilihat pada *Non Performing Loan (NPL)*. NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka

semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004;231). Akibattingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modalbank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPLmenjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa penilaian pemberian kredit antara lain penelitian yang di lakukan oleh:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pratiwi, 2012. FE. Universitas Hasanuddin, Makassar	Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL).
2.	Andri Priyo Utomo, ST., 2008. FE. Universitas Gunadarma, Jakarta	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap Kinerja Keuangan Bank berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas.

3.	Ali Shingjergji, 2013. FE. <i>University of Elbasan</i> "Aleksander Xhuvani", Albania	<i>The Impact of Macroeconomic Variables on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 - 2012</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL).
4.	Ahlem Selma Messai, 2013. FE. <i>University of Sousse</i> , Tunisia	<i>Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Gross Domestic Product (GDP)</i> dan <i>Return On Asset (ROA)</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
5.	Aamir Azeem & Amara, 2014. <i>Virtual university of Pakistan</i> . Pakistan	<i>Impact of Profitability on Quantum of Non-Performing Loans</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Loan (NPL)</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Return On Equity (ROE)</i> .

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI DAN NON SEKTOR EKONOMI TERHAAP RETURN ON ASSET (ROA) DAN NON PERFORMING LOAN(NPL) (Studi Kasus Pada Perbankan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2013)”**

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (Perdagangan Besar & eceran, Konstruksi, Industri, Transportasi, Pergudangan & Komunikasi, dan Jasa Dunia Usaha) dan Non Sektor Ekonomi (Investasi, dan Konsumtif) Pada Perbankan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2013?
2. Bagaimana perkembangan Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) pada Perbankan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2013?
3. Bagaimana pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap ROA?
4. Bagaimana pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi terhadap ROA?
5. Bagaimana pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap NPL?

6. Bagaimana pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi terhadap NPL?
7. Bagaimana pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi terhadap Return On Asset (ROA) baik secara parsial maupun secara simultan pada Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013?
8. Bagaimana pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) baik secara parsial maupun secara simultan pada Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta informasi yang relevan yang berhubungan dengan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Dan Non Sektor Ekonomi Pada Perbankan Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Dan Non Sektor Ekonomi Pada Perbankan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui perkembangan ROA dan NPL pada Perbankan Daerah Di Indonesi Tahun 2009-2013.

3. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap ROA Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.
4. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi terhadap ROA Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.
5. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap NPL Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.
6. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi terhadap NPL Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.
7. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan penilaian Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi terhadap ROA baik secara parsial maupun secara simultan pada Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.
8. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan penilaian Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi terhadap NPL baik secara parsial maupun secara simultan pada Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai bahan penyusunan skripsi dan menambah pengetahuan tentang pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi dan non sektor ekonomi pada perbankan daerah di Indonesia dengan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi, serta melatih kemampuan analisis dan berfikir sistematis, serta pengalaman untuk meneliti selanjutnya.
2. Bagi perbankan daerah, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi bank daerah yang mungkin akan di manfaatkan untuk mengelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit dan dapat meningkatkan nilai bagi para pemilik bank
3. Bagi investor, dapat memberikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi pada perusahaan yang telah menerapkan pemberian kredit.
4. Bagi pihak lain, melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lanjut dengan masalah yang sama.

#### **1.5. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

##### **1.5.1. Kerangka pemikiran**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan

yang memberikan kredit(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masamendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telahdijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk,1998:12).

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagaipenyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antarabank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlahtungga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003:163).

Kredit menurut Anwar (2002:14), kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.

Kredit menurut Rivai dan Veithzal (2007:4),kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengelompokan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat dilihat dari:

A. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka waktu Kredit:

1. Kredit jangka pendek (*short term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2. Kredit jangka menengah (*intermediate term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang (*long term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

B. Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit:

1. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
2. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
3. Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.
4. Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

C. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya:

1. Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.
2. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
3. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan

konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

D. Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha dan lain-lain.

E. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat:

1. Kredit atas dasar transaksi satu kali (eenmalig), yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.
2. Kredit atas dasar transaksi berulang (revolving), yaitu kredit jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.
3. Kredit atas dasar plafon terkait, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.
4. Kredit atas dasar plafon terbuka, yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.

5. Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (aflopendplafond), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank.

F. Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana:

1. Kredit dengan dana bank sendiri
2. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium).
3. Kredit dengan dana dari luar negeri.

G. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk:

1. *Cash Loan*, yaitu pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.
2. *Non Cash Loan*, yaitu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai.

H. Kredit Berdasarkan Wewenang Pemutusan

Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala divisi dan direksi wilayah).

I. Kredit Berdasarkan sifat Fasilitas:

1. *Committed Facility*, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada bank untuk

menarik kembali/menangguhkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

2. *Uncommitted Facility*, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

J. Kredit Berdasarkan Akad:

1. Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dengan nasabah, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara pelunasan dan sebagainya.
2. Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka sektor ekonomi dan non sektor ekonomi (pada uraian di atas disebut dengan tujuan penggunaan) merupakan salah satu dari jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai kebutuhan pada sektor ekonomi dan non sektor ekonomi.

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai arti yang penting. Penguasa moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan pengendalian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambilnya. Bank-bank komersil sebagai alat dari penguasa moneter mau tidak mau juga harus memperhatikan pembagian kredit menurut sektor ekonomi ini,

karena di samping untuk memenuhi ketentuan yang ada juga ternyata bermanfaat pula dalam perencanaan kredit yang akan diberikan/dipasarkan.

Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (Bank Indonesia: pedoman penyusunan laporan bulanan bank-bank: 1982:24).

1. Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.
3. Industri.
4. Konstruksi.
5. Listrik, Gas, dan Air.
6. Perantara Keuangan.
7. Jasa-jasa Sosial.
8. Jasa-jasa Kesehatan.
9. Jasa-jasa Dunia Usaha.
10. Jasa-Jasa Pendidikan.
11. Pertambangan dan Penggalian.
12. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi.
13. Perternakan
14. Perikanan
15. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial.

Sedangkan pada pemberian kredit berdasarkan non sektor ekonomi terbagi menjadi 3 (tiga). Yaitu:

A. Kredit Modal kerja:

Meij dalam Riyanto (2001 : 18) mengartikan modal sebagai kolektifitas dari baran - barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, sedang yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksudkan dalam kekayaan ialah daya beli yang terdapat dalam barang modal. Dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit.

B. Kredit Investasi:

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sadono Sukirno, 1997:107). Maka kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1(satu) tahun.

C. Kredit Konsumtif:

Lubis (Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (dalam Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa batas dan manusia lebih mementingkan faktor keinginan dari pada

kebutuhan. Maka kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Almilia dan Herdiningtyas, 2005 pada Adriyanti, 2011). Non Performing Loan (NPL) merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit, adapun rumus dari NPL adalah (Kusumawati, 2008):

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

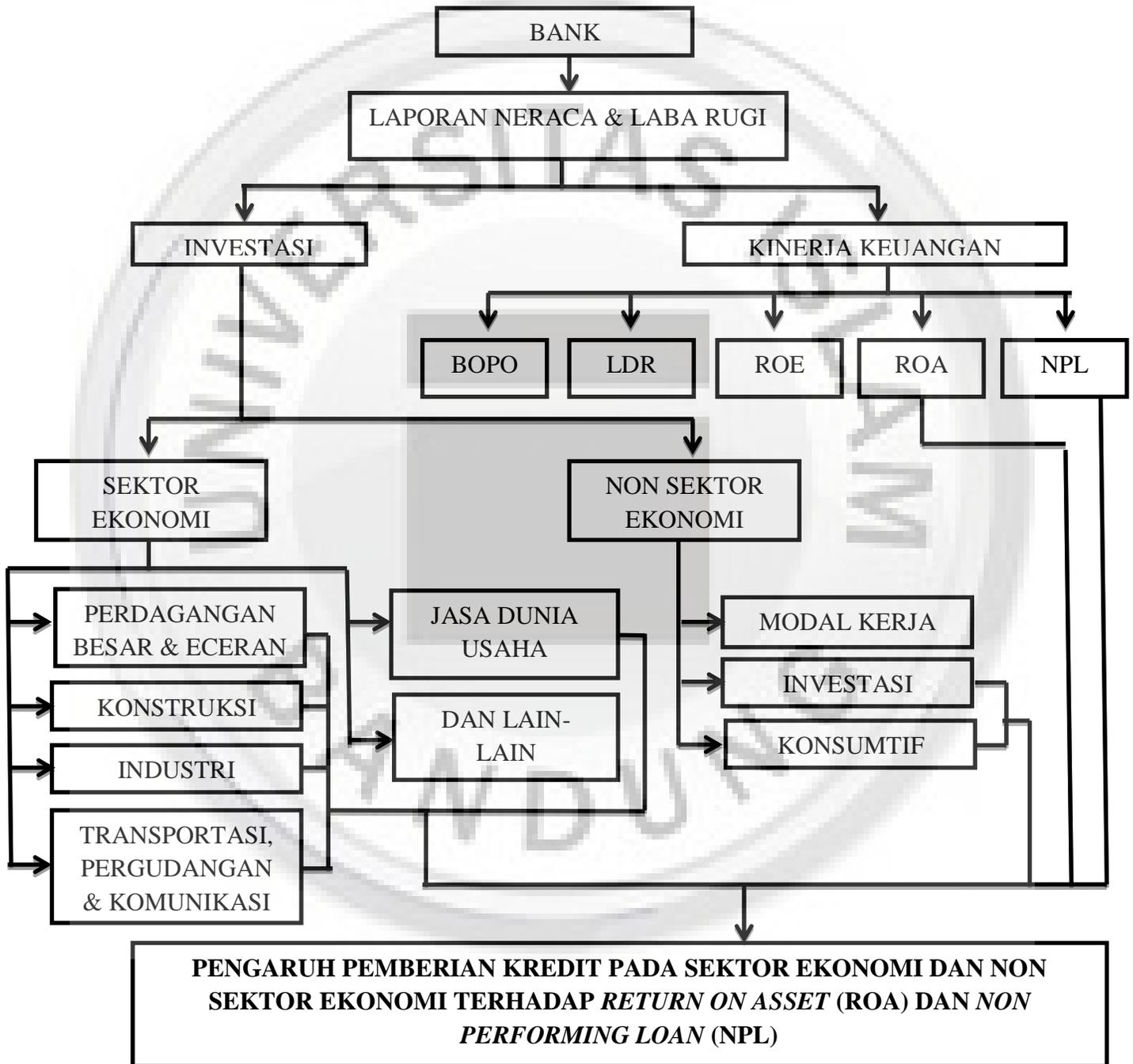
**Tabel 1.1**

**Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL**

<b>RASIO</b>	<b>PREDIKAT</b>
NPL ≤ 5 %	Sehat
NPL ≥ 5 %	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Gambar 1.1  
Krangka Pemikiran



### **1.5.2. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. Perumusan hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- ❖ **Adanya pengaruh pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi terhadap ROA dan NPL**
- ❖ **Adanya pengaruh pemberian kredit berdasarkan non sektor ekonomi terhadap ROA dan NPL**